

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Efektivitas Program

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas lebih menekankan pada keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memperhatikan ketepatan serta kesesuaian hasil yang diperoleh. Dengan kata lain, suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila hasil akhirnya sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan sejak awal.²¹

Menurut Gibson efektivitas merupakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha bersama dalam suatu organisasi. Efektivitas dipandang sebagai tolok ukur keberhasilan, yaitu sejauh mana organisasi mampu mencapai sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Gibson menekankan bahwa efektivitas bukan hanya menyangkut hasil akhir, tetapi juga bagaimana proses

²¹ Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

pencapaian tujuan dilakukan secara tepat dan benar sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal.²²

Menurut Steers efektivitas adalah tingkat sejauh mana organisasi melaksanakan tugas-tugas pokoknya sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas menekankan ketercapaian sasaran inti dari suatu program dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, semakin besar ketercapaian tujuan yang diraih, semakin tinggi pula tingkat efektivitas suatu program.

Dari ketiga pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pada dasarnya berkaitan dengan ketercapaian tujuan atau sasaran dari suatu kegiatan, program, atau organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Efektivitas mengukur sejauh mana hasil yang diperoleh sesuai dengan rencana, target, atau tujuan yang telah ditetapkan.²³

Pada penelitian ini, konsep efektivitas yang tepat digunakan adalah menurut teori Steers, hal ini lebih relevan untuk dijadikan dasar, karena. Alasannya, penelitian ini berfokus pada evaluasi sejauh mana program pemerintah dalam bidang ketahanan pangan

²² Gibson, James L. *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. Texas: Business Publications, 2019.

²³ Steers, Richard M. *Efficiency and Effectiveness in Managerial Practice*. Illinois: Scott Foresman, 2019.

mampu mencapai tujuan utamanya ., yaitu Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Definisi Steers ini tepat karena menekankan pada ketercapaian tujuan inti program sehingga dengan arah penelitian ini.

2. Dimensi Evaluasi Efektivitas Program

Dalam mengevaluasi efektivitas program, terdapat beberapa dimensi penting yang sering dijadikan acuan, yaitu:²⁴

a. Relevansi (*Relevance*)

Relevansi adalah sejauh mana tujuan dan kegiatan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Program dapat dikatakan relevan apabila dirancang berdasarkan analisis kebutuhan nyata, bukan sekadar mengikuti tren atau kepentingan politik sesaat. Misalnya, program ketahanan pangan akan relevan jika benar-benar diarahkan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan ketersediaan pangan, bukan hanya untuk memenuhi target proyek semata. Relevansi memastikan bahwa program yang dijalankan memiliki alasan keberadaan (*justification*) yang jelas.

²⁴ Nikolaus Dionesius Budiman and Lorensius Santu, “Kajian Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mencapai Target Swasembada Beras,” *Jurnal Pertanian Cemara* 21, no. 2 (December 2, 2024)..

b. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi mengukur perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Program yang efisien adalah program yang mampu menghasilkan output maksimal dengan input minimal. Namun demikian, efisiensi harus dipahami secara hati-hati karena penggunaan sumber daya yang sedikit tetapi menghasilkan kualitas rendah bukanlah bentuk efisiensi yang sebenarnya. Efisiensi sejati adalah penggunaan sumber daya secara tepat, hemat, namun tetap menghasilkan kualitas yang baik sesuai tujuan.

c. Efektivitas (*Effectiveness*)

Dimensi ini fokus pada sejauh mana tujuan program tercapai. Program dinilai efektif apabila seluruh indikator kinerja utama (*Key Performance Indicator/KPI*) dapat dicapai sesuai target. Misalnya, sebuah program pelatihan keterampilan kerja dianggap efektif apabila peserta tidak hanya hadir dalam pelatihan, tetapi juga mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya diukur secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif berdasarkan dampak nyata bagi penerima manfaat.

d. Dampak (*Impact*)

Dampak adalah perubahan jangka panjang yang dihasilkan dari pelaksanaan program. Dampak bisa berupa peningkatan taraf hidup, perubahan perilaku, atau terbentuknya sistem sosial yang lebih baik. Dampak sering kali lebih sulit diukur karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terlihat. Namun, pengukuran dampak sangat penting untuk menilai keberhasilan program secara menyeluruh. Misalnya, program pendidikan dapat diukur dampaknya dengan melihat penurunan angka putus sekolah atau peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

e. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Keberlanjutan menilai sejauh mana manfaat dari program dapat terus dirasakan meskipun program telah selesai. Program yang baik tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat agar mampu mandiri setelah program berakhir. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi masyarakat akan berkelanjutan apabila masyarakat dapat mengembangkan usaha secara mandiri tanpa bergantung lagi pada bantuan.

3. Tujuan Evaluasi Efektivitas Program

Evaluasi efektivitas program memiliki beberapa tujuan utama yang saling terkait. Tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁵

a. Mengetahui tingkat pencapaian tujuan program

Tujuan pertama evaluasi adalah untuk menilai sejauh mana program yang telah dilaksanakan mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan sejak awal. Melalui evaluasi, pengelola program dapat mengetahui apakah indikator kinerja telah terpenuhi atau masih terdapat kekurangan. Penilaian ini menjadi dasar dalam menentukan apakah program dianggap berhasil atau perlu dilakukan perbaikan pada aspek tertentu.

b. Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan program

Setiap program pasti memiliki aspek yang sudah berjalan baik serta aspek yang masih perlu ditingkatkan. Evaluasi berfungsi untuk mengungkap keduanya secara objektif, sehingga kelebihan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, sementara

²⁵ Yemi Atika Maharani, M Yusuf Bahtiar, and Yulistia Devi, "Bersubsidi Pada Program Kartu Tani Untuk Kesejahteraan Petani Pedesaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Oku Selatan) Socio-Economic Dynamics Of Subsidized Fertilizer Distribution System In Kartu Tani Program," *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 13, no. 1 (2025): 1–14.

kelemahan dapat diperbaiki. Identifikasi ini juga penting agar kesalahan yang sama tidak terulang pada pelaksanaan program berikutnya.

c. Menjamin akuntabilitas dan transparansi

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat serta sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik maupun lembaga donor. Akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab pengelola program terhadap penggunaan sumber daya, sementara transparansi memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan program dapat dipantau secara terbuka.

d. Memberikan masukan untuk perencanaan program berikutnya

Hasil evaluasi berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program di masa depan. Informasi tentang faktor pendukung maupun penghambat dapat menjadi dasar dalam menentukan strategi baru yang lebih efektif. Dengan demikian, perencanaan selanjutnya dapat disusun secara lebih tepat sasaran, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pembelajaran organisasi

Evaluasi tidak hanya memberikan informasi mengenai pencapaian program, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi organisasi. Melalui evaluasi, organisasi dapat meningkatkan kapasitas kelembagaannya, memperbaiki sistem kerja, serta membangun mekanisme yang lebih efisien. Hal ini berdampak pada meningkatnya kualitas program di masa depan, karena organisasi belajar dari pengalaman yang telah ada.

f. Menentukan kelayakan keberlanjutan atau penghentian program

Evaluasi juga bertujuan untuk memberikan dasar pengambilan keputusan mengenai kelanjutan program. Jika program dinilai efektif dan bermanfaat, maka dapat dilanjutkan bahkan diperluas cakupannya. Sebaliknya, jika program dinilai tidak efektif dan tidak memberikan dampak signifikan, maka dapat dihentikan atau diganti dengan strategi lain yang lebih relevan.²⁶

²⁶ Muzahadatul Linafsi, Niswatun Hasanah, and M. Shaiful Umam, "Penetapan Imbalan Dalam Sistem Samsarah Pada Praktik Jual Beli Sapi Tinjauan Ekonomi Islam," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 8, no. 1 (July 6, 2025): 13–28.

4. Model-Model Evaluasi Program

Dalam kajian akademik, evaluasi program tidak hanya dipahami sebagai aktivitas penilaian semata, tetapi juga membutuhkan kerangka model tertentu yang dapat memandu evaluator dalam mengukur efektivitas program. Model evaluasi berfungsi sebagai acuan metodologis yang membantu menentukan aspek apa saja yang harus dinilai, bagaimana cara mengukurnya, serta bagaimana menarik kesimpulan dari hasil evaluasi tersebut. Beberapa model evaluasi program yang sering digunakan adalah sebagai berikut:²⁷

a. Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*)

Model yang dikembangkan oleh Stufflebeam ini merupakan salah satu model evaluasi paling populer. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis empat komponen utama, yaitu:

- 1) *Context* (konteks): menilai kebutuhan, masalah, dan tujuan program.
- 2) *Input* (masukan): mengevaluasi strategi, sumber daya, dan perencanaan program.

²⁷ Syarifah Erma Yuna, Sufian Hamim, and Rendi Prayuda, "Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Pengembangan Program Ketahanan Pangan Di Desa Baru Kabupaten Kampar," *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 11, no. 1 (May 18, 2025): 142–66.

- 3) *Process* (proses): menilai implementasi program, kendala yang dihadapi, dan kepatuhan terhadap rencana.
- 4) *Product* (produk): menilai hasil atau dampak program baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Model CIPP dianggap komprehensif karena tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses dan faktor yang melatarbelakangi keberhasilan program.

b. Model Kirkpatrick (*Four Levels Evaluation*)

Model evaluasi ini sering digunakan dalam dunia pelatihan atau pendidikan, tetapi relevan pula untuk program sosial maupun pembangunan. Kirkpatrick membagi evaluasi menjadi empat level, yaitu:

- 1) *Reaction* (reaksi): mengukur kepuasan peserta atau penerima manfaat terhadap program.
- 2) *Learning* (pembelajaran): menilai sejauh mana pengetahuan, keterampilan, atau sikap berubah setelah mengikuti program.
- 3) *Behavior* (perilaku): mengevaluasi apakah terjadi perubahan nyata dalam perilaku peserta setelah program berjalan.
- 4) *Result* (hasil): melihat dampak akhir program terhadap tujuan besar organisasi atau masyarakat.

Kelebihan model ini adalah fokus pada perubahan perilaku dan hasil nyata, bukan hanya penilaian administratif.

c. Model *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan)

Model ini menekankan pada sejauh mana tujuan program yang telah dirumuskan sebelumnya berhasil dicapai. Evaluator membandingkan antara tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang diperoleh di lapangan. Jika kesesuaian tinggi, maka program dianggap efektif. Kelebihan model ini adalah fokus dan sederhana, namun kelemahannya adalah cenderung mengabaikan faktor proses dan konteks yang memengaruhi pencapaian tujuan.

d. Model *Discrepancy* (Kesenjangan)

Model ini menekankan identifikasi kesenjangan antara standar yang telah ditetapkan dengan realitas di lapangan. Evaluator mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar operasional, pedoman, atau target kinerja. Semakin kecil kesenjangan yang terjadi, semakin baik efektivitas program tersebut. Model ini sangat berguna untuk perbaikan manajemen internal organisasi.

e. Model Responsive Evaluation

Model evaluasi ini lebih menekankan pada kebutuhan dan perspektif pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan terhadap program, khususnya penerima manfaat (*stakeholders*). Evaluasi dilakukan dengan menggali pengalaman, persepsi, serta kepuasan mereka terhadap pelaksanaan program. Kelebihan model ini adalah lebih demokratis dan partisipatif, karena suara masyarakat lebih didengar dalam proses evaluasi.

f. Model Utilization-Focused Evaluation

Dikembangkan oleh Michael Quinn Patton, model ini menekankan bahwa evaluasi harus dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna hasil evaluasi (*intended users*). Artinya, tujuan utama evaluasi bukan hanya menghasilkan laporan, melainkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Model ini menekankan aspek kegunaan dan kebermanfaatan nyata.

B. Ketahanan Pangan

1. Pengertian Ketahanan Pangan

Menurut Sunaryo ketahanan pangan adalah kondisi ketika pangan tersedia cukup, aman, dan bergizi serta dapat diakses setiap orang untuk hidup sehat dan produktif. Konsep ini tidak hanya menekankan jumlah

ketersediaan, tetapi juga aspek kualitas dan aksesibilitas. Sunaryo menambahkan bahwa ketahanan pangan mencakup tiga pilar utama, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan.²⁸

Menurut Arsyad ketahanan pangan merupakan kemampuan suatu negara atau daerah dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat dengan memperhatikan jumlah, mutu, distribusi, dan keterjangkauan harga. Hal ini berarti pangan tidak cukup hanya ada, melainkan harus terjangkau oleh daya beli masyarakat serta terdistribusi merata agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah.²⁹

Menurut Masyhuri ketahanan pangan adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, aman, merata, terjangkau, serta sesuai dengan budaya dan gizi masyarakat. Definisi ini menegaskan pentingnya pemerataan distribusi dan keterjangkauan harga sebagai dasar tercapainya ketahanan pangan.³⁰

Ketiga definisi di atas menunjukkan bahwa ketahanan pangan memiliki cakupan yang luas dan

²⁸ Sunaryo, Ketahanan Pangan: Konsep dan Implementasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 45.

²⁹ Arsyad, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 112.

³⁰ Masyhuri, Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 67.

multidimensional. Sunaryo menekankan aspek ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan; Arsyad menyoroti pentingnya distribusi dan keterjangkauan harga; sementara Masyhuri menekankan pemenuhan pangan pada level rumah tangga yang adil, merata, dan sesuai budaya. Apabila digabungkan, maka ketahanan pangan dapat dimaknai sebagai kondisi ketika seluruh masyarakat, baik individu maupun rumah tangga, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, terdistribusi secara merata, terjangkau oleh daya beli, serta sesuai dengan nilai dan kebutuhan mereka, sehingga mampu menopang kehidupan yang sehat dan produktif. Dengan demikian, ketahanan pangan bukan sekadar persoalan teknis produksi, melainkan juga menyangkut distribusi, keadilan sosial, ekonomi, serta nilai-nilai budaya dan agama.

Dari ketiga pengertian tersebut, definisi menurut Masyhuri paling relevan dijadikan dasar penelitian ini. Penelitian berjudul “Evaluasi Efektivitas Program Ketahanan Pangan Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Mekar Sari Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)” berfokus pada evaluasi program pemerintah di tingkat rumah tangga masyarakat desa. Definisi Masyhuri menekankan pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga, bukan

hanya skala nasional, serta memasukkan aspek pemerataan distribusi, keterjangkauan harga, dan kesesuaian budaya yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, keadilan distribusi, keterjangkauan bagi semua lapisan, dan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan nilai utama. Dengan demikian, penggunaan definisi Masyhuri akan lebih memudahkan analisis efektivitas program ketahanan pangan pemerintah di Desa Mekar Sari dalam mewujudkan tujuan syariah, yakni menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) dan kesejahteraan masyarakat.

2. Dimensi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan terdiri atas beberapa dimensi utama, yaitu:³¹

a. Ketersediaan pangan (*food availability*).

Ketersediaan pangan merujuk pada jumlah pangan yang tersedia dalam suatu wilayah atau negara, baik yang berasal dari produksi domestik, impor, maupun cadangan pangan. Dimensi ini menekankan bahwa pangan harus cukup secara fisik sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumsi seluruh penduduk. Tanpa ketersediaan pangan yang

³¹ Siti Khusnia, Imam Royani Hamzah, and Lempuing Jaya, "Efektifitas Kebijakan Pemerintah Sumatera Selatan Tentang Harga Gabah Perspektif Maqashid Syariah," *Journal Of Science And Social Research* 4307, no. August (2025): 4528–35.

memadai, dimensi ketahanan pangan lainnya sulit untuk diwujudkan.

b. Akses pangan (*food access*).

Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan yang tersedia, baik melalui daya beli maupun akses fisik ke sumber pangan. Meski pangan tersedia secara nasional, ketahanan pangan tidak tercapai jika masyarakat tidak mampu mengaksesnya, misalnya karena hambatan ekonomi, keterbatasan infrastruktur, atau ketimpangan distribusi.

c. Pemanfaatan pangan (*food utilization*).

Pemanfaatan pangan mengacu pada kemampuan individu atau rumah tangga dalam mengolah dan mengonsumsi pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi secara seimbang. Hal ini mencakup aspek pola konsumsi, pengetahuan gizi, serta perilaku hidup sehat. Dengan kata lain, pangan yang tersedia dan dapat diakses harus benar-benar dimanfaatkan secara optimal agar memberikan manfaat kesehatan yang maksimal.

d. Stabilitas pangan (*food stability*).

Stabilitas pangan berkaitan dengan keberlangsungan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan dalam jangka panjang, baik pada

kondisi normal maupun saat terjadi guncangan seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau perubahan iklim. Dimensi ini menekankan pentingnya ketahanan pangan yang berkelanjutan sehingga kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dalam situasi apapun.

3. Indikator Ketahanan Pangan

Indikator ketahanan pangan dapat diukur melalui beberapa aspek berikut:³²

a. Ketersediaan jumlah pangan yang cukup.

Indikator ini menilai sejauh mana pangan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Ketersediaan pangan dapat berasal dari produksi pertanian domestik, impor, maupun cadangan strategis pemerintah.

b. Distribusi dan aksesibilitas pangan.

Distribusi pangan yang baik memastikan pangan dapat sampai ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah terpencil. Aksesibilitas juga mencakup kemudahan masyarakat dalam memperoleh

³² Cicik Widiyana, Zaenudin Mansyur, and Baiq Ratna Mulhimmah, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara," *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 235–48.

pangan melalui sarana transportasi, pasar, dan jaringan distribusi lainnya.

c. Mutu dan keamanan pangan.

Ketahanan pangan tidak hanya dilihat dari jumlah, tetapi juga mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi. Pangan harus bebas dari zat berbahaya, mengandung gizi yang seimbang, serta sesuai standar kesehatan agar tidak menimbulkan risiko penyakit.

d. Keterjangkauan harga pangan.

Harga pangan yang stabil dan terjangkau menjadi indikator penting karena sangat menentukan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan. Jika harga pangan terlalu tinggi, masyarakat miskin akan kesulitan memenuhi kebutuhan gizi harian mereka.

e. Stabilitas pasokan dalam jangka panjang.

Indikator ini menilai apakah ketersediaan dan distribusi pangan dapat dipertahankan secara berkelanjutan, termasuk pada saat terjadi guncangan eksternal. Stabilitas pasokan mencakup kesiapan menghadapi perubahan iklim, bencana alam, maupun fluktuasi ekonomi global.³³

³³ Muhammad Rizki Smith et al., “Evaluasi Peran Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dalam Mendukung Program Stunting Dan Ketahanan Pangan Di Indonesia,” *Nusantara Hasana Journal* 4, no. 9 (2025): 9–22.

4. Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang kompleks. Adapun faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁴

a. Produktivitas Pertanian

Produktivitas pertanian merupakan faktor utama yang menentukan ketersediaan pangan dalam negeri. Tingkat produktivitas dipengaruhi oleh kesuburan tanah, ketersediaan air, pemanfaatan teknologi, serta penggunaan input produksi seperti benih unggul, pupuk, dan pestisida. Semakin tinggi produktivitas pertanian, semakin besar pula pasokan pangan yang dapat dihasilkan. Namun, jika produktivitas rendah akibat keterbatasan teknologi, kerusakan lingkungan, atau kurangnya dukungan pemerintah, maka ketersediaan pangan akan terancam. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas pertanian melalui modernisasi, mekanisasi, dan penelitian inovatif menjadi kunci penting dalam menjaga ketahanan pangan.

³⁴ Ervan Yuliansyah et al., “Efektivitas Implementasi Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Keluarga Rentan Di Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan,” *Journal of Management and Social Sciences* 4, no. 1 (January 23, 2025): 130–47.

b. Akses Ekonomi dan Distribusi Pangan

Ketersediaan pangan tidak akan berarti apabila masyarakat tidak mampu mengaksesnya. Faktor ekonomi, seperti tingkat pendapatan dan daya beli, sangat menentukan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan yang layak. Selain itu, distribusi pangan juga memegang peranan penting karena ketimpangan distribusi dapat menimbulkan kelangkaan di suatu daerah meski ada surplus di daerah lain. Pembangunan infrastruktur jalan, pasar, transportasi, dan logistik sangat diperlukan agar pangan dapat menjangkau semua wilayah, termasuk daerah terpencil. Dengan demikian, akses ekonomi dan distribusi pangan merupakan faktor penentu tercapainya ketahanan pangan secara merata.

c. Perubahan Iklim dan Kondisi Lingkungan

Perubahan iklim global telah menjadi tantangan besar bagi ketahanan pangan. Fenomena seperti perubahan pola curah hujan, kekeringan panjang, banjir, dan badai dapat mengganggu proses produksi pertanian. Selain itu, degradasi lingkungan akibat deforestasi, pencemaran, dan alih fungsi lahan juga berdampak buruk terhadap keberlanjutan produksi pangan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas,

peningkatan harga pangan, bahkan krisis pangan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta adaptasi terhadap perubahan iklim sangat diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan jangka panjang.

d. Kebijakan Pemerintah dan Stabilitas Politik

Peran pemerintah sangat menentukan dalam menjaga ketahanan pangan. Kebijakan terkait impor, ekspor, subsidi, cadangan pangan nasional, hingga pengendalian harga dapat memengaruhi stabilitas pangan dalam negeri. Selain itu, stabilitas politik juga menjadi faktor penting karena ketidakstabilan dapat mengganggu sistem distribusi, produksi, bahkan akses masyarakat terhadap pangan. Kebijakan yang konsisten, berorientasi pada kepentingan rakyat, serta mendukung kesejahteraan petani akan memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan nasional.

e. Perilaku Konsumsi dan Pola Makan Masyarakat

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah perilaku konsumsi masyarakat. Ketahanan pangan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan dan distribusi, tetapi juga bagaimana masyarakat mengonsumsi dan memanfaatkan pangan tersebut. Kesadaran akan pentingnya gizi seimbang, kebiasaan makan sehat, serta pemanfaatan pangan lokal dapat

mendukung ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan. Sebaliknya, pola konsumsi yang hanya bergantung pada satu komoditas (misalnya beras) dapat membuat sistem pangan rentan terhadap krisis. Diversifikasi pangan dan perubahan perilaku konsumsi menjadi salah satu upaya penting dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga maupun nasional.³⁵

5. Ketahanan Pangan dalam Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, ketahanan pangan memiliki makna strategis karena negara ini merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia serta memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia menghadapi tantangan ganda dalam mencapai ketahanan pangan, yaitu tingginya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan serta infrastruktur. Pemerintah Indonesia telah menegaskan pentingnya ketahanan pangan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa pangan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Hal ini menandakan bahwa negara berkewajiban untuk

³⁵ Jopinus Saragih, "Evaluasi Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan," *Cakrawala Repositori IMWI* 7, no. 3 (June 19, 2024): 1175–85.

memastikan setiap warga memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau.³⁶

Namun, dalam realitasnya, ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satunya adalah ketergantungan pada komoditas tertentu, seperti beras, yang membuat ketahanan pangan nasional rentan terhadap fluktuasi produksi. Di sisi lain, distribusi pangan juga menjadi masalah serius karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam. Banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau sehingga mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan pangan dengan harga terjangkau. Masalah lain adalah masih rendahnya produktivitas pertanian di beberapa sektor akibat keterbatasan teknologi, akses permodalan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian.³⁷

Meskipun demikian, Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat. Kekayaan sumber daya alam, lahan pertanian yang luas, serta keragaman komoditas pangan lokal menjadi modal

³⁶ Amanda Dwita Aprilia, Aksi Hamzah, and Jumriani, "Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pendistribusian Raskin Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Manajeng Kabupaten Bone," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (April 27, 2025): 547–54.

³⁷ Yuni Setiowati and Mukhsinun Mukhsinun, "Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Anggaran Dana Desa: Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Ambarwinangun Tahun 2022," *Journal of Management, Economics, and Entrepreneur* 2, no. 2 (2023): 343–70.

utama. Pemerintah terus berupaya memperkuat ketahanan pangan melalui berbagai program, seperti peningkatan produksi beras, pengembangan diversifikasi pangan berbasis lokal (misalnya jagung, sagu, dan umbi-umbian), serta penguatan cadangan pangan nasional. Selain itu, digitalisasi pertanian, pembangunan infrastruktur logistik, serta pemberdayaan petani dan kelompok masyarakat desa menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Dengan upaya yang berkesinambungan, ketahanan pangan di Indonesia diharapkan dapat terjaga secara stabil, tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga untuk menghadapi dinamika global seperti perubahan iklim, krisis energi, maupun gejolak ekonomi dunia.³⁸

C. Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut Mannan ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan berlandaskan pada aturan Allah SWT dan Rasul-Nya. Perspektif ekonomi Islam menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga harus sesuai dengan syariat Islam, yakni menghindari riba, *gharar*, dan praktik yang merugikan. Hal ini

³⁸ Dimas Fadilah, "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal," *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (March 27, 2025).

menunjukkan bahwa ekonomi Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan sarana mencapai kemaslahatan umat.³⁹

Menurut Antonio ekonomi Islam merupakan sistem yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan distribusi kekayaan yang merata. Perspektif ini mengajarkan bahwa segala aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan prinsip syariah, seperti kehalalan, keadilan, serta mengutamakan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, perspektif ekonomi Islam menilai bahwa suatu program atau kegiatan ekonomi harus sesuai dengan *maqasid syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁰

Menurut Ascarya ekonomi Islam dipandang sebagai suatu sistem yang komprehensif dan integral, yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Perspektif ekonomi Islam menekankan keterpaduan antara tujuan dunia dan akhirat, sehingga keberhasilan suatu kegiatan tidak hanya diukur dari sisi material, tetapi juga dari sisi spiritual dan moral. Dengan kata lain, perspektif ekonomi Islam menempatkan

³⁹ Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2022.

⁴⁰ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2021.

nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi.⁴¹

Dari ketiga definisi di atas, dapat dipahami bahwa perspektif ekonomi Islam memandang kegiatan ekonomi bukan hanya sebagai aktivitas duniawi semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan spiritual dan sosial. Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap aktivitas ekonomi harus sesuai dengan aturan syariah, menjunjung tinggi keadilan, keberlanjutan, serta kemaslahatan umat.

Dalam konteks penelitian berjudul “*Evaluasi Efektivitas Program Ketahanan Pangan Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Mekar Sari Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)*”, definisi yang dikemukakan oleh Antonio paling relevan. Hal ini karena penelitian menitikberatkan pada evaluasi program ketahanan pangan yang tidak hanya diukur dari aspek pencapaian tujuan duniawi (tersedianya pangan), tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang diajarkan dalam Islam. Perspektif ini menegaskan bahwa keberhasilan program harus dinilai dari seberapa jauh ia sejalan dengan *maqasid syariah*.

⁴¹ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022, h. 59.

2. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam berdiri di atas prinsip-prinsip yang kuat, yang mengatur perilaku ekonomi umat Islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:⁴²

a. *Tauhid* (Keimanan kepada Allah SWT)

Segala aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah. Seorang muslim yang berdagang, berinvestasi, atau bekerja tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dan ridha Allah. *Tauhid* menjadi fondasi yang membentuk sikap amanah, jujur, dan tanggung jawab dalam mengelola harta.

b. Keadilan (*‘Adalah*)

Keadilan merupakan nilai utama dalam ekonomi Islam. Praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak, seperti riba, monopoli, penimbunan, dan kecurangan, dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Islam menekankan adanya *win-win solution* dalam setiap transaksi.

c. Keseimbangan (*Tawazun*)

Aktivitas ekonomi harus memperhatikan keseimbangan antara dunia dan akhirat, individu dan

⁴² Nadilla Zahra and Ramadani Ramadani, “Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Pada Keluarga Miskin Dalam Perspektif Maqasid Syariah,” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023).

sosial, konsumsi dan investasi, produksi dan distribusi. Konsep ini menghindarkan manusia dari sikap konsumtif berlebihan (israf) maupun kikir.

d. Kebebasan dengan Batasan Syariah

Manusia memiliki kebebasan untuk mencari nafkah, berdagang, maupun berinvestasi, tetapi kebebasan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan syariat. Misalnya, haram hukumnya berbisnis minuman keras, judi, dan riba.

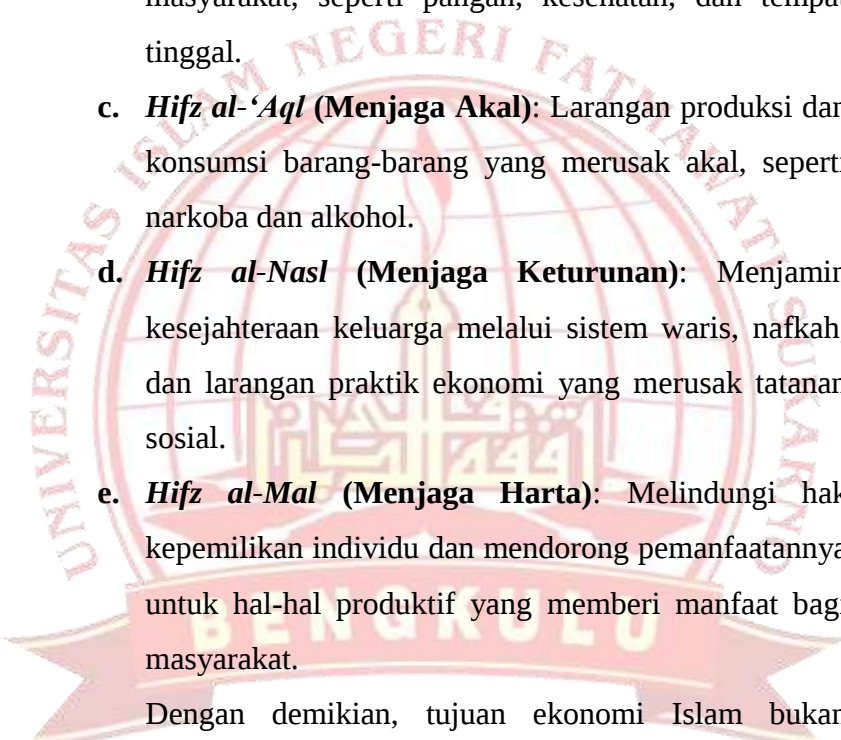
e. Tanggung Jawab Sosial

Islam mengajarkan bahwa harta bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki hak orang lain di dalamnya. Oleh karena itu, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan infak, sedekah, serta wakaf sebagai instrumen distribusi sosial yang mampu mengurangi kesenjangan ekonomi.

3. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan yang hakiki atau *falah*, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, ekonomi Islam mengacu pada *maqashid syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam), yang terdiri dari:⁴³

⁴³ Muhammad Kaisa Azzimar and Hendra Harmain, "Implementasi Bantuan Ekonomi Mikro Melalui Bank Sumut Terhadap Masyarakat Tanjungbalai Pada Masa Pandemi Covid-19 Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (July 22, 2022): 2241.

- 
- a. **Hifz al-Din (Menjaga Agama):** Melalui larangan aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan akidah dan syariah, seperti riba, maisir, dan *gharar*.
 - b. **Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa):** Ekonomi Islam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, kesehatan, dan tempat tinggal.
 - c. **Hifz al-'Aql (Menjaga Akal):** Larangan produksi dan konsumsi barang-barang yang merusak akal, seperti narkoba dan alkohol.
 - d. **Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan):** Menjamin kesejahteraan keluarga melalui sistem waris, nafkah, dan larangan praktik ekonomi yang merusak tatanan sosial.
 - e. **Hifz al-Mal (Menjaga Harta):** Melindungi hak kepemilikan individu dan mendorong pemanfaatannya untuk hal-hal produktif yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, tujuan ekonomi Islam bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pemerataan, keberlanjutan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi.⁴⁴

⁴⁴ Fadilah, "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal."

4. Instrumen Ekonomi Islam

Untuk mewujudkan prinsip dan tujuan tersebut, ekonomi Islam memiliki instrumen yang khas, antara lain:⁴⁵

a. Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

Instrumen distribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan, menguatkan solidaritas sosial, serta memperbaiki kesenjangan ekonomi. Misalnya, dana zakat dapat dikelola untuk pemberdayaan UMKM, pendidikan, dan kesehatan.

b. Larangan Riba

Islam menolak sistem bunga karena menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Sebagai gantinya, diterapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang lebih adil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

c. Sistem Bagi Hasil

1) *Mudharabah*: kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung pemilik modal.

⁴⁵ Ripki Mulia Rahman, Hendri Tanjung, and Ibdalsyah Ibdalsyah, "Optimalisasi Wakaf Produktif Untuk Memperkuat Sistem Ketahanan Pangan," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 5 (August 3, 2022): 1147–66.

- 2) *Musyarakah*: kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal dan berbagi keuntungan maupun kerugian.

d. Prinsip Halal dan *Thayyib*

Semua produk yang dikonsumsi harus halal (sesuai syariah) dan *thayyib* (baik untuk kesehatan dan kehidupan).

e. Pasar yang Adil

Islam mendukung mekanisme pasar bebas, tetapi dengan pengawasan moral agar tidak terjadi kecurangan, penipuan, monopoli, maupun penimbunan barang.

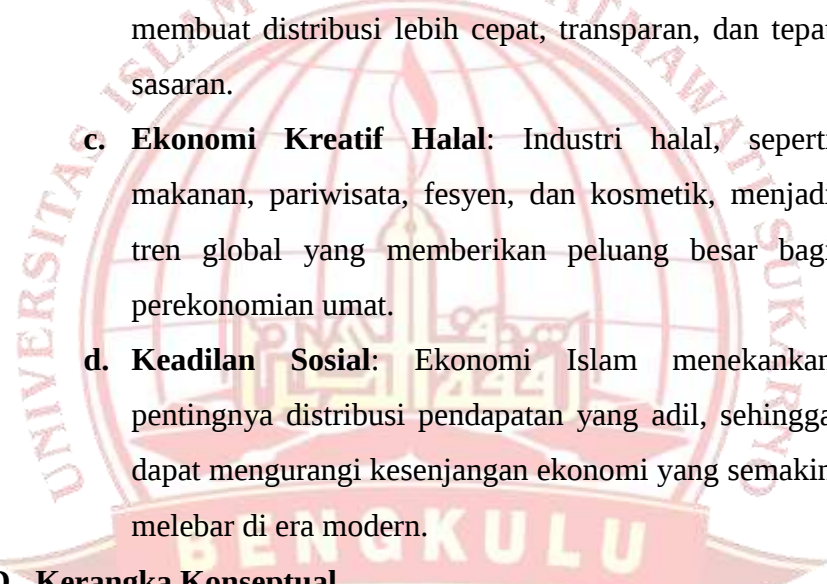
5. Relevansi Ekonomi Islam dalam Konteks Modern

Di era globalisasi dan digitalisasi, penerapan prinsip ekonomi Islam menjadi semakin penting. Sistem kapitalis global sering menimbulkan ketidakadilan, krisis finansial, dan kerusakan lingkungan. Ekonomi Islam hadir sebagai solusi alternatif dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.⁴⁶

Beberapa relevansi ekonomi Islam dalam konteks modern antara lain:⁴⁷

⁴⁶ Nur Hesthria, "Implementasi Kegiatan Alokasi Sumber Daya Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 2 (December 19, 2022): 247–55.

⁴⁷ Nida Humaida et al., "Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Islam," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 1 (2020): 131.

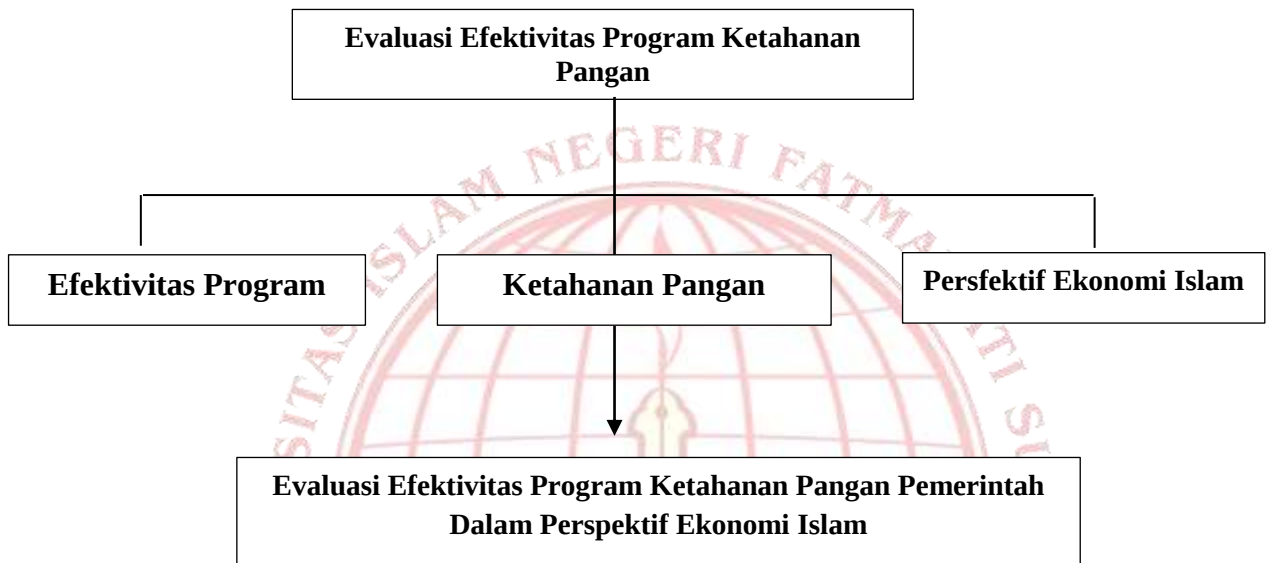
- 
- a. **Perbankan dan Keuangan Syariah:** Kehadiran bank syariah, BPRS, dan *fintech* syariah membuktikan bahwa sistem keuangan Islam mampu bersaing sekaligus menjadi solusi bagi masyarakat yang menghindari riba.
 - b. **Zakat Digital dan Wakaf Produktif:** Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat dan wakaf membuat distribusi lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
 - c. **Ekonomi Kreatif Halal:** Industri halal, seperti makanan, pariwisata, fesyen, dan kosmetik, menjadi tren global yang memberikan peluang besar bagi perekonomian umat.
 - d. **Keadilan Sosial:** Ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi pendapatan yang adil, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang semakin melebar di era modern.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran singkat yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama dalam suatu penelitian atau kajian. Kerangka ini menunjukkan bagaimana variabel atau ide utama saling terkait dan menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan yang dibahas. Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka dapat disusun suatu

kerangka pikir penelitian yang disajikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



1. Evaluasi Efektivitas Program Ketahanan Pangan

Evaluasi efektivitas bertujuan untuk menilai sejauh mana program ketahanan pangan yang dijalankan pemerintah berhasil mencapai target. Aspek ini menilai ketepatan sasaran, kebermanfaatan bagi masyarakat, serta konsistensi dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam penelitian, evaluasi efektivitas digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui apakah intervensi pemerintah benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan.

2. Efektivitas Program

Efektivitas program dilihat dari implementasi kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. Efektivitas ini mencakup kesesuaian antara tujuan dan hasil, kemampuan menjawab permasalahan pangan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Jika suatu program efektif, maka indikator-indikator ketahanan pangan dapat tercapai dengan baik.

3. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menjadi variabel inti yang mencerminkan kondisi ketersediaan pangan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Dalam kerangka ini, ketahanan pangan dilihat sebagai hasil yang diharapkan dari program pemerintah, di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan secara cukup, bergizi, dan berkelanjutan. Aspek ini juga menunjukkan bagaimana intervensi pemerintah berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

4. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif ekonomi Islam menjadi landasan normatif dalam menilai program ketahanan pangan. Islam menekankan keadilan distribusi, larangan praktik penimbunan (*ihtikar*), pentingnya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), serta mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi

seluruh masyarakat. Dengan demikian, efektivitas program tidak hanya diukur dari hasil teknis, tetapi juga sejauh mana nilai-nilai Islam terimplementasi dalam kebijakan dan praktik di lapangan.

5. Evaluasi Efektivitas Program Ketahanan Pangan Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Bagian akhir kerangka konseptual merupakan integrasi dari semua variabel. Evaluasi dilakukan dengan melihat:

- a. Apakah program pemerintah menyediakan pangan yang cukup,
- b. Apakah akses pangan adil dan merata,
- c. Apakah pemanfaatan pangan mendorong pola makan sehat,
- d. Apakah stabilitas pangan terjamin dalam jangka panjang,

dan semua poin tersebut dinilai berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dengan demikian, hasil penelitian diarahkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan program pemerintah sekaligus menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam.